



# 2022

# POLICY BRIEF

Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika

Vol.4 No.4, 2022

## DAULAT PANGAN DI DESA TAMBANG

Heru Purwandari<sup>1\*</sup>, Rai Sita<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Dosen Departemen Sains, Komunikasi, dan Pengembangan Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia, IPB University

\*Email: heru\_purwandari@apps.ipb.ac.id

### Isu Kunci

- Industrialisasi Pedesaan Sektor Pertambangan.
- Perubahan Agroekologi Desa.
- Ancaman Kedaulatan Petani.
- Peraturan Desa dan Isu Pangan.

### Ringkasan

*Sektor pertambangan secara drastis merubah bentang alam pedesaan dan menggeser peran petani sebagai kelompok yang berdaulat atas agroekosistem. Perubahan yang terjadi serta merta menggiring pada terciptanya sistem penghidupan yang baru bagi petani. Sayangnya, dalam banyak kasus, situasi ini meminggirkan peran petani sebagai penyedia pangan komunitas. Petani tidak dapat secara cepat beradaptasi dengan transformasi bentang alam yang terjadi dan tetap bertahan pada model pertanian konvensional dengan produktivitas yang makin menurun. Campur tangan pemerintah harus hadir guna mengatur ekspansi pertambangan dan mengembalikan kualitas hidup masyarakat sekitar tambang dalam berbagai dimensi.*

## Pendahuluan

Industrialisasi pedesaan merupakan isu yang selalu menarik untuk dikaji dalam konteks pembangunan desa. Sudut pandang analisis berangkat dari beragam aspek diantaranya aspek sosial, lingkungan, ekonomi, bahkan budaya. Pilihan cara pandang tersebut terutama diarahkan untuk memotret dampak hadirnya industri pedesaan bagi masyarakat.

Salah satu industri yang hadir di wilayah pedesaan dan memberi dampak lingkungan yang sangat signifikan adalah industri pertambangan. Transformasi ekologi sebagai akibat dari aktivitas tersebut dengan mudah dapat diidentifikasi. Hal mencolok yang dapat dikenali adalah berubahnya lahan pertanian menjadi lahan kering bahkan kubangan bekas galian tambang. Kesempatan kerja yang dijanjikan hadir seiring beroperasinya pertambangan rupanya hanya sebatas strategi menarik simpati warga. Hanya sedikit yang bisa menjadi bagian dari aktivitas tersebut, sementara sebagian besar lain harus bertahan hidup dari sisa sumberdaya.

Alih fungsi sebagian besar lahan pertanian menjadi lahan industri membuat desa kehilangan perannya sebagai penyedia pangan bagi seluruh warga. Kualitas lahan makin menurun sehingga lahan pertanian tak lagi mampu menopang kehidupan petani. Kualitas lingkungan yang makin terdegradasi ini berpotensi menghadirkan kualitas hidup yang rendah bagi penduduk.

Hasil penelitian “Transformasi Agro-Ekologi Pedesaan: Sisi Lain Pola Interelasi Desa-Kota” yang didanai oleh LPDP dalam skema riset keilmuan merupakan dasar dari penulisan *policy brief* ini. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa desa memiliki beban yang berat justru ketika desa diwajibkan menyediakan fasilitas bagi pembangunan kota. Hasil eksploitasi sumberdaya mengalir ke perkotaan tanpa menyisakan ruang hidup yang cukup bagi penduduk kota.

Penelitian tersebut berupaya untuk memperlihatkan bahwa interaksi desa-kota bersifat timpang dan hanya menguntungkan salah satu pihak. Aliran timbal balik berupa pertukaran penduduk, informasi, keuangan, serta barang dan jasa yang sedianya terjadi secara seimbang antara desa dan kota justru menempatkan desa sebagai pusat eksploitasi.

Penelitian tersebut dimaksudkan untuk membuktikan bahwa industrialisasi pedesaan terutama sektor pertambangan justru akan mengancam eksistensi penduduk desa. Tanpa pendampingan dari pemerintah desa/daerah, desa yang dipenuhi oleh aktivitas pertambangan kelak akan menjadi kota mati yang memperlihatkan bukti keserakahan manusia.

Tulisan ini berisi rekomendasi kebijakan terutama strategi bagaimana menangani desa-desa yang sudah terkontaminasi oleh pembukaan tambang.

## Pembahasan

Konsep yang perlu muncul dalam menganalisis keterkaitan industri dan pertanian meliputi bagaimana daya rusak pertambangan mengancam desa pertanian dan sejauhmana hal tersebut mengancam kedaulatan petani. Konsep tersebut menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan menyelamatkan desa dari kehancuran ekologi, sosial, ekonomi, dan budaya.

### A. Ancaman Kedaulatan Petani

Ancaman atas kedaulatan petani lebih banyak bersumber dari faktor eksternal dibanding faktor internal. Faktor yang dirasakan paling signifikan mengubah sistem penghidupan petani adalah perubahan penggunaan lahan yang dengan cepat menggerus sendi-sendi kehidupan petani. Borras dan Franco memperlihatkan gambaran *trajectory* perubahan penggunaan lahan yang didalamnya meliputi; perubahan dari peruntukkan pangan ke peruntukan pangan, perubahan dari

peruntukkan pangan ke biofuel, perubahan dari peruntukkan non-pangan ke pangan, dan perubahan dari peruntukkan non-pangan ke biofuel (Borras dan Franco 2012). Persoalan alih fungsi lahan ini menjadi pintu masuk memahami posisi petani dan pertanian yang makin tersudut. Sensus Pertanian 2013 memperlihatkan kecenderungan menurunnya lahan pertanian di Jawa Barat (BPS 2013). Penyebab alih fungsi lahan yang mendominasi di Jawa Barat adalah pembangunan infrastruktur yang memusnahkan 13.024 ha lahan pertanian kualitas unggul di tahun 2020. Bagi Jawa Barat, laju konversi lahan sangat signifikan mengingat provinsi ini dekat dengan ibukota sehingga pembangunan infrastruktur jalan tol digencarkan untuk menopang pembangunan ibukota. Konsentrasi industri di beberapa daerah di Jawa Barat turut memicu hilangnya sawah terbaik berproduktivitas tinggi di kabupaten sentra penghasil padi.

Selain industri, jasa, dan sarana infrastruktur transportasi, ibukota juga membutuhkan dukungan bagi pembangunan properti. Bahan bangunan tentu harus didatangkan dari luar ibukota namun dengan jarak yang ideal agar tidak justru memberi beban pada infrastruktur yang sudah dibangun. Wilayah Jawa Barat sekitar Jabodetabek kemudian memainkan peran yang sangat signifikan dalam fasilitasi tersebut. Salah satu penyumbang bahan bangunan (batu) adalah Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor. Selain emas yang dihasilkan PT. Antam di Kecamatan Nanggung, salah satu wilayah di Kabupaten Bogor, yaitu Kecamatan Cigudeg memiliki deretan perbukitan dengan kandungan batu tinggi, bahkan terdapat gunung yang sudah ditambang sejak tahun 1970-an dan masih beroperasi hingga kini. Pola eksploitasi yang bersifat menghancurkan ini menggeser peran ekosistem sebagai penyedia kebutuhan dasar penduduk menjadi penyedia bahan tambang untuk pembangunan kota. Fungsi petani dan pertanian dengan demikian tergerus dan

kedaulatan petani atas sumberdaya menjadi lenyap.

#### **B. Aktivitas Pertambangan di Desa Pertanian**

Bagi Kabupaten Bogor, Kecamatan Cigudeg merupakan lima besar wilayah penyumbang angka produktivitas padi. Bahkan, sebelum lahan kering dijual dan dialih fungsikan menjadi areal pertambangan oleh investor, Desa Batujajar dan desa lain disekelilingnya merupakan desa sentra buah-buahan. Durian, cempedak, nangka, duku, petai, jengkol, adalah sebagian hasil panen yang dihasilkan dari desa ini. Hadirnya aktivitas tambang sejak awal tahun 1980-an menyebabkan terjadinya pembelian lahan secara kolektif dan menyebabkan desa ini kehilangan identitasnya sebagai daerah pertanian. Masifnya aktivitas pertambangan terutama galian C memicu bencana ekologi bagi warga.

Dibandingkan aktivitas lain, pertambangan dipastikan sebagai aktivitas ekonomi yang secara signifikan mentransformasi bentang alam wilayah setempat. Pertambangan dengan beragam skala, tak terkecuali merupakan jenis pemanfaatan sumberdaya alam yang sangat rakus. Sayangnya tidak semua aktivitas pertambangan dapat diidentifikasi derajat pengrusaknya terhadap lingkungan sekitar.

Pertambangan besar sebagai proyek strategis memiliki data yang dapat diakses. Hal ini membuat potret pertumbuhan sekaligus konsekuensi hadirnya pertambangan jenis dapat diidentifikasi dengan baik. Sebagai contoh, angka penurunan laju pertumbuhan riil PDRB yang tercatat di data BPS Kabupaten Bogor merujuk pada aktivitas pertambangan emas pongkor sebagai perusahaan BUMN. Sementara pertumbuhan pertambangan galian C luput dari perhatian karena pola pengusahaan bersifat pribadi sehingga pencatatan tidak formal. Akibatnya, pemerintah daerah tidak dapat mengontrol bagaimana pola eksploitasi dan

sejauhmana dampaknya terhadap sosio-ekosistem setempat.

Akibat dari ketiadaan data, maka transformasi ekologi dan sosio-ekonomi dianggap sebagai mitos. Bukti-bukti bahwa pertambangan mematikan sistem pertanian dengan demikian harus didukung dengan penelitian yang secara utuh memotret daya dukung lingkungan bagi warga desa. Analisa kepadatan fisiologis (menghitung kemampuan lahan pertanian dalam menopang kehidupan seluruh masyarakat) dan kepadatan agraris (sejauhmana petani masih dapat hidup dari lahan-lahan pertanian) dapat menjadi pintu masuk menghitung akhir dari kehidupan desa tambang.

Ciri kuat yang segera nampak dari desa tambang adalah sebagian besar desa tenaga kerja berasal dari luar desa, sementara warga desa tak mampu hidup layak dalam keterbatasan sumberdaya (UN 2019). Pertanian kemudian menjadi katup penyelamat bagi kelompok yang tidak terserap di sektor industri desa dan juga tak mampu bergerak keluar desa untuk mencari sistem penghidupan lain. Namun makin hari pertambangan bergerak dari lahan pertanian kering ke area persawahan dan mengancam pertanian sebagai *exit strategy* bagi sebagian besar petani tradisional.

## Implikasi dan Rekomendasi

Rumusan rekomendasi tentu harus mempertimbangkan faktor peluang dijalanannya kebijakan yang dipilih. Menilik kondisi yang terjadi, beberapa hal yang harus mendapat perhatian lebih adalah:

1. Menggugah *political will* pemerintah baik di tingkat desa maupun kabupaten, yang berarti:
  - a. Pemerintah harus fokus pada kebijakan terkait izin pembukaan pertambangan individu. Melalui informasi dari pemerintah desa, pemerintah daerah

dapat memperoleh data mengenai tata guna lahan di tingkat tapak lalu. Data spasial yang diperoleh dapat dianalisis dengan memasukkan variabel mata pencaharian penduduk, tenaga kerja, tingkat kesejahteraan dan variabel lain yang relevan. Data ini menjadi penting sebagai acuan untuk menghitung daya dukung lingkungan sebagai dasar menghentikan aktivitas pertambangan.

- b. Menyusun peraturan desa yang mengatur;  
**pertama**, restorasi lahan pertanian sawah. Pemantauan harus dilakukan secara ketat dengan melibatkan teknologi. Peta dasar desa yang berisikan informasi tata guna lahan terlebih dahulu disosialisasikan kepada seluruh elemen masyarakat. Warga harus memahami tata guna lahan yang sesuai dengan kebutuhan hidupnya sekaligus menjaga tata guna lahan tersebut tidak berubah akibat kepentingan aktor tertentu. **Kedua**, mengatur mekanisme *profit sharing* antara perusahaan pertambangan dengan penduduk sekitar lahan tambang. Penguatan Bumdes dengan ini menjadi poin penting dalam mengontrol bagian yang masuk ke desa dan lalu digunakan untuk keperluan pemberdayaan masyarakat. *Profit sharing* juga dapat dianggap sebagai kompensasi munculnya dampak lingkungan, ekonomi, dan budaya. **Ketiga**, menyusun pertimbangan teknis terkait lahan pertambangan yang telah selesai masa eksploitasi atau berhenti operasi agar dapat dikembalikan kepada desa dan kemudian menjadi lahan desa yang kelak dipergunakan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat.
2. Menyusun jejaring dengan mitra, baik akademisi, lembaga penelitian, maupun lembaga lain yang dapat membantu mengoptimalkan sumberdaya yang tersisa. Bentuk kegiatan yang dapat dikembangkan adalah mengidentifikasi komoditas pertanian

yang sistem budidayanya bersifat efisien sekaligus bisa dikembangkan menjadi produk olahan. Komoditas yang dikembangkan harus sesuai dengan agroekologi setempat yang telah mengalami perubahan akibat aktivitas pertambangan, diantaranya keterbatasan air, iklim yang kering, kondisi tanah yang miskin hara, dll. Disamping itu, komoditas yang dikembangkan harus aman dari gangguan sosial yang mungkin muncul akibat ketiadaan peluang kerja. Hal yang juga penting adalah komoditas yang ditanam harus dapat dikembangkan menjadi produk lokal dengan potensi keterlibatan kelompok marjinal lain (misalnya perempuan) dalam meningkatkan nilai tambah komoditas.

3. Menyiapkan kelembagaan lokal yang berfungsi sebagai wadah aktivitas kolektif yang didesain guna kegiatan pemberdayaan kelompok marjinal. Mengingat karakter penduduk desa yang terkontaminasi oleh pola kehidupan perkotaan, maka perlu dibangun kesadaran bahwa program pemberdayaan masyarakat adalah kerja bersama yang didukung oleh banyak pihak demi kesejahteraan semua elemen masyarakat desa. Melalui strategi penyadaran tujuan akhir dari kegiatan tersebut, maka program akan dianggap sebagai bagian dari kehidupan masyarakat, dengan demikian potensi keberlanjutan akan mudah terwujud.

karenanya, petani dan kelompok masyarakat yang hidup dari bentang alam pedesaan harus mendapat perhatian karena degradasi lingkungan meluruhkan sistem penghidupan.

## Daftar Pustaka

- Borras S, Franco J. 2012. Global Land Grabbing and Trajectories of Agrarian Change: A Preliminary Analysis. *J Agrar Chang*. 12:34–59. doi:10.1111/j.1471-0366.2011.00339.x.
- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2013. Sensus Pertanian 2013. Hasil Pencacahan Lengkap Provinsi Jawa Barat. Dapat diakses pada: <https://jabar.bps.go.id/publication/2014/12/01/501650ee57fe4379a323b48a/sensus-pertanian-2013-hasil-pencacahan-lengkap-provinsi-jawa-barat.html>
- [UN] United Nation. 2019. United Nations Declaration on the Rights of Peasants and Other People Working in Rural Area. Report. Resolution adopted by the General Assembly on 17 December 2018. General Assembly.

## Penutup

Mengidentifikasi perubahan agroekosistem dan bagaimana respons setiap kelompok masyarakat terhadap situasi yang muncul penting dilakukan. Lingkungan yang terdegradasi menciptakan buruknya kualitas hidup masyarakat. Tekanan terhadap sistem penghidupan, kemiskinan, dan kekurangan pangan tidak saja dirasakan petani, melainkan seluruh kelompok masyarakat yang ada. Oleh



**Direktorat  
Publikasi Ilmiah  
dan Informasi Strategis**

Direktorat Publikasi Ilmiah dan Informasi Strategis IPB (DPIS IPB) melaksanakan tugas dalam mengkaji dan mengelola informasi terkait isu-isu strategis untuk meningkatkan peran IPB dalam kebijakan pertanian, kelautan dan biosains tropika, serta mendorong peningkatan publikasi ilmiah untuk mendukung IPB menjadi World Class University.

**Direktorat Publikasi Ilmiah dan Informasi Strategis (DPIS), IPB University**  
Gedung LSI Lantai 1, Jl. Kamper, Kampus IPB Dramaga, Bogor - Indonesia 16680  
Website: <https://dpis.ipb.ac.id>

